



**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH DINAS PETERNAKAN,  
PERIKANAN, DAN KELAUTAN KABUPATEN JEMBER**  
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Disperikel  
Kabupaten Jember Tahun 2015)

***IMPLEMENTATION PROCESS OF GRANTS Program DEPARTEMENT OF  
LIVESTOCK, FISHERIES AND MARINE JEMBER DISTRICT***  
(A Case Study of Farmer Livestock Assistance Grant Recipients DEPARTEMENT  
OF LIVESTOCK, FISHERIES AND MARINE Jember 2015)

**SKRIPSI**

Oleh  
**Rahmat Firdaus**  
**NIM 090910201050**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH DINAS PETERNAKAN,  
PERIKANAN, DAN KELAUTAN KABUPATEN JEMBER**  
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Disperikel  
Kabupaten Jember Tahun 2015)

***IMPLEMENTATION PROCESS OF GRANTS Program DEPARTEMENT OF  
LIVESTOCK, FISHERIES AND MARINE JEMBER DISTRICT***  
(A Case Study of Farmer Livestock Assistance Grant Recipients DEPARTEMENT  
OF LIVESTOCK, FISHERIES AND MARINE Jember 2015)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh  
**Rahmat Firdaus**  
**NIM 090910201050**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku Ayahanda Budi Santoso dan Ibu Kartini atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan dan kepercayaan penuh serta nasihat-nasihatnya selama ini;
2. Isteri dan Anakku tercinta Ayu Inayatus Shofah, A.Md dan Azarine Queena Firdaus;
3. Seluruh Guru dan Dosen sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Sahabat-sahabatku yang selalu ada dan tidak pernah bosan mengingatkan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ini;
5. Almamaterku tercinta. Administrasi Negara FISIP Universitas Jember

**MOTTO**

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita berhasil melakukannya dengan baik.”

(Evelyn Underhill)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

(Aristoteles)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rahmat Firdaus

NIM : 090910201050

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Proses Pelaksanaan Program Hibah Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Dsiperikel Kabupaten Jember Tahun 2015)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2016

Yang menyatakan,

Rahmat Firdaus  
NIM. 090910201050

**SKRIPSI**

**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH DINAS PETERNAKAN,  
PERIKANAN, DAN KELAUTAN KABUPATEN JEMBER**  
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Disperikel  
Kabupaten Jember Tahun 2015)

Oleh  
**Rahmat Firdaus**  
**NIM 090910201050**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Inti Wasiati, M.M

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Proses Pelaksanaan Program Hibah Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Dsiperikel Kabupaten Jember Tahun 2015)” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 29 Juni 2016

tempat : Ruang Ujian Skripsi AN Lt II Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP. 196503121991031003

Dra. Inti Wasiati, M.M  
NIP. 196103311989021001

Anggota Tim Penguji

1. Drs. Supranoto, M.Si ( )  
NIP. 196102131988021001
2. Drs. Boedijono, M.Si ( )  
NIP. 196103311989021001
3. Drs. A. Kholik Azhari, M.Si ( )  
NIP. 195607261989021001

Mengesahkan,

Dekan

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Proses Pelaksanaan Program Hibah Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Disiperikel Kabupaten Jember Tahun 2015);** Rahmat Firdaus, 090910201050; 2016: 96 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan hibah barang yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 menyebutkan belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Ada beberapa alasan mengapa hal-hal di atas penting dilakukan yaitu, (a) Implikasi otonomi daerah yang bertujuan mengembangkan daerah berdasarkan potensi, preferensi dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat sehingga daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan perekonomiannya sendiri; (b) peternakan menjadi sektor yang strategis untuk dikembangkan karena wilayah Kabupaten Jember sangat mendukung bagi budi daya ternak; (c) hibah berupa pengadaan barang ini dinilai lebih efektif guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh Disiperikel; (d) pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani ternak; (e) anggaran yang mencapai 4 Milyar untuk hibah barang ini sangat baik dan positif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Jember sekaligus menjadikan Jember sebagai sentra ternak nasional.

Dari hasil penelitian dan pengamatan ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan hibah barang ini dilaksanakan oleh tim administrasi, tim verifikasi, dan tim monitoring dari Disperikel Kab. Jember. Adapun tugas dari tim verifikasi adalah untuk (1) menerima, mengagendakan, mencocokkan antara proposal dengan draf kelompok calon penerima hibah barang; (2) melaksanakan identifikasi dan verifikasi proposal; (3) membuat berita acara verifikasi dan menyerahkan proposal kepada tim administrasi. Setelah tugas tim verifikasi selesai dan diteruskan ke tim administrasi maka tugas tim administrasi adalah (1) membuat usulan persetujuan Bupati terhadap proposal yang telah diverifikasi; (2) membuat NHPD dan mengajukannya melalui Bagian Hukum Sekretariat Kab. Jember; (3) membuat berkas pengajuan pencairan bagi kelompok yang telah lengkap berkas persyaratannya; (4) menerima rekapitulasi daftar kelompok yang menerima hibah barang untuk diserahkan. Terakhir, tim monitoring melalui Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas (PPHP) melakukan monev dengan meminta laporan berkala triwulan untuk mengetahui perkembangan ternak hasil hibah barang Disperikel.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan kunci yang telah ditentukan untuk memperoleh sekaligus mengolah data dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Selama proses penelitian ternyata mengalami kejenuhan data bahwa proses pelaksanaan hibah barang harus mengikuti syarat yang ditetapkan Disperikel. Hibah barang ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang bersandarkan pada potensi daerah Kabupaten Jember. Dari proses pelaksanaan hibah barang ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya program hibah barang merupakan salah satu bagian untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di sektor peternakan. Selain itu kegiatan hibah barang ini ditujukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, memanfaatkan potensi Kab. Jember di sektor peternakan, dan menjadikan Kab. Jember sebagai sentra ternak nasional.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Program Hibah Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Dsiperikel Kabupaten Jember Tahun 2015)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Drs. Inti Wasiati, M.M selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Supranoto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. M. Hadi Makmur, S.Sos. M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus mahasiswa

6. Seluruh Dosen beserta segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Drs. Noer Faqih. GH, M.Si selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Disperikel Kabupaten Jember yang senantiasa terbuka dalam membantu penyelesaian karya tulis ini
8. Firas Chalid, SH (Kepala Bidang Peternakan), Ir. Eko Harianto (Kasie Budidaya dan Pengembangan Ternak), Ir. Haris Muslimin (Kepala Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM) yang senantiasa terbuka dalam membantu penyelesaian karya tulis ini
9. Kelompok Tani Ternak Se-Kabupaten Jember yang senantiasa memberi inspirasi kepada penulis
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini dengan mendengarkan saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak. Semoga Tuhan senantiasa membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Akhirnya terima kasih yang sebesar-besarnya dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Jember, 29 Juni 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

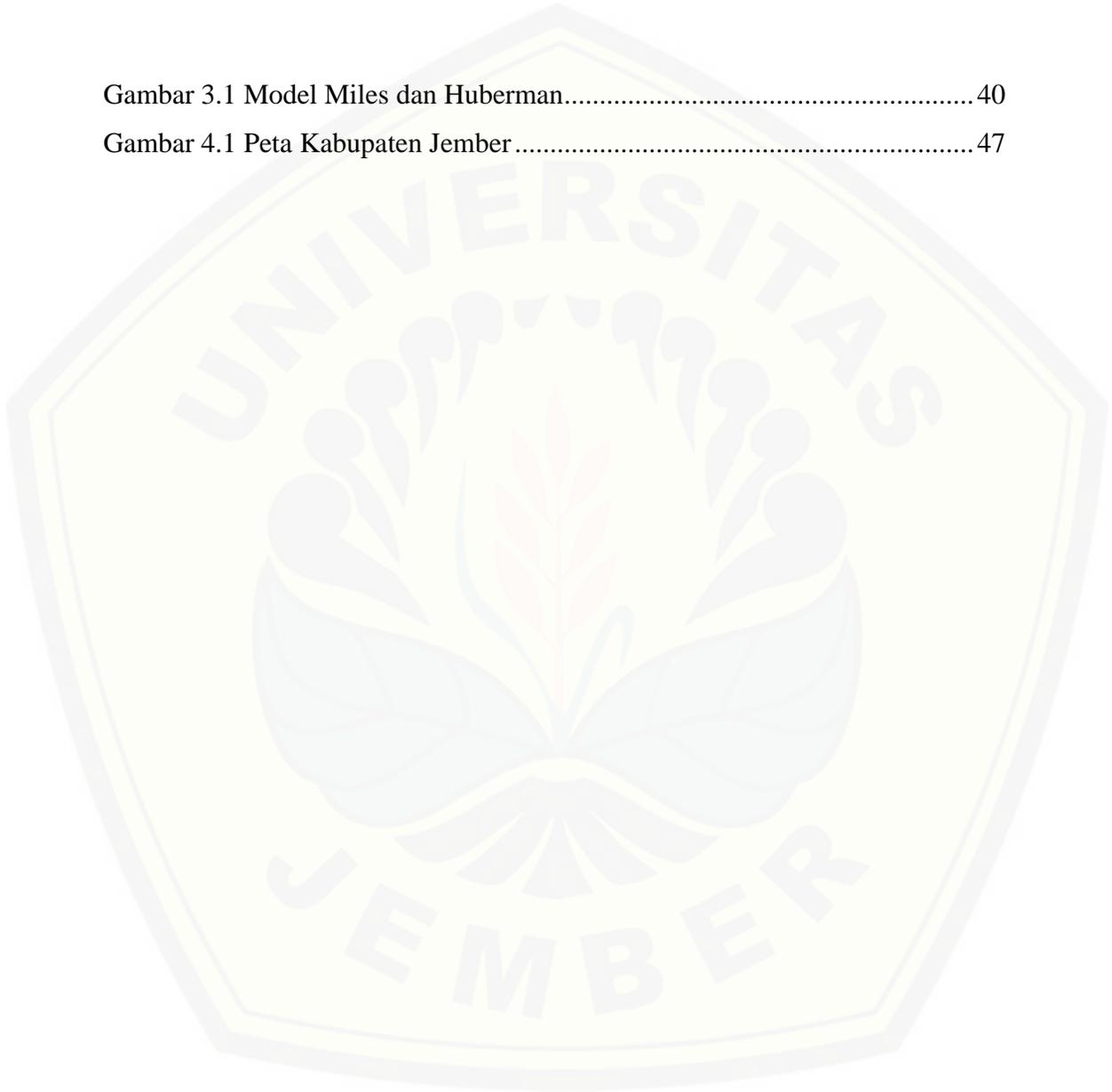
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Otonomi Daerah .....</b>	<b>14</b>
<b>2.2 Kebijakan Publik .....</b>	<b>15</b>

<b>2.3 Implementasi</b>	<b>18</b>
2.3.1 Pengertian Implementasi	18
2.3.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn	19
2.3.3 Model Implementasi Sabatier dan Mazmanian	22
2.3.4 Tinjauan Pelaksanaan	23
<b>2.4 Belanja Hibah</b>	<b>25</b>
<b>2.5 Kelompok Tani Ternak</b>	<b>28</b>
<b>2.6 Kerangka Berfikir</b>	<b>30</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Fokus Penelitian</b>	<b>32</b>
<b>3.3 Objek Penelitian</b>	<b>33</b>
<b>3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian</b>	<b>33</b>
<b>3.5 Sumber dan Jenis Data</b>	<b>33</b>
3.5.1 Data Primer	34
3.5.2 Data Sekunder	34
<b>3.6 Informan Penelitian</b>	<b>35</b>
<b>3.7 Teknik dan Alat Perolehan Data</b>	<b>36</b>
<b>3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data</b>	<b>38</b>
<b>3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data</b>	<b>42</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian</b>	<b>46</b>
4.1.1 Kabupaten Jember	46
4.1.2 Kondisi Umum Kabupaten Jember	51
<b>4.2 Disperikel Kabupaten Jember</b>	<b>55</b>

4.2.1 Tugas dan Fungsi Disperikel.....	56
4.2.2 Visi Misi Disperikel Kab. Jember.....	57
4.2.3 Tujuan Disperikel.....	57
4.2.4 Sasaran Pembangunan Peternakan.....	58
4.2.5 Stakeholder Organisasi.....	60
4.2.6 Tantangan dan Isu Aktual Pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015.....	60
4.2.7 Kondisi Peternakan Kab. Jember .....	61
<b>4.3 Pelaksanaan Hibah Barang Oleh Disperikel Kab. Jember .....</b>	<b>65</b>
4.3.1 Pemahaman Hibah Barang.....	65
4.3.2 Proses Pelaksanaan di Tingkat Masyarakat .....	68
4.3.3 Prosedur Pengajuan Hibah Barang.....	70
4.3.4 Prosedur Pencairan Hibah Barang .....	82
<b>4.4 Hambatan Pelaksanaan Hibah Barang .....</b>	<b>85</b>
<b>4.5 Pembahasan .....</b>	<b>88</b>
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
5.1 Kesimpulan .....	93
5.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Model Miles dan Huberman.....40  
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Jember .....47

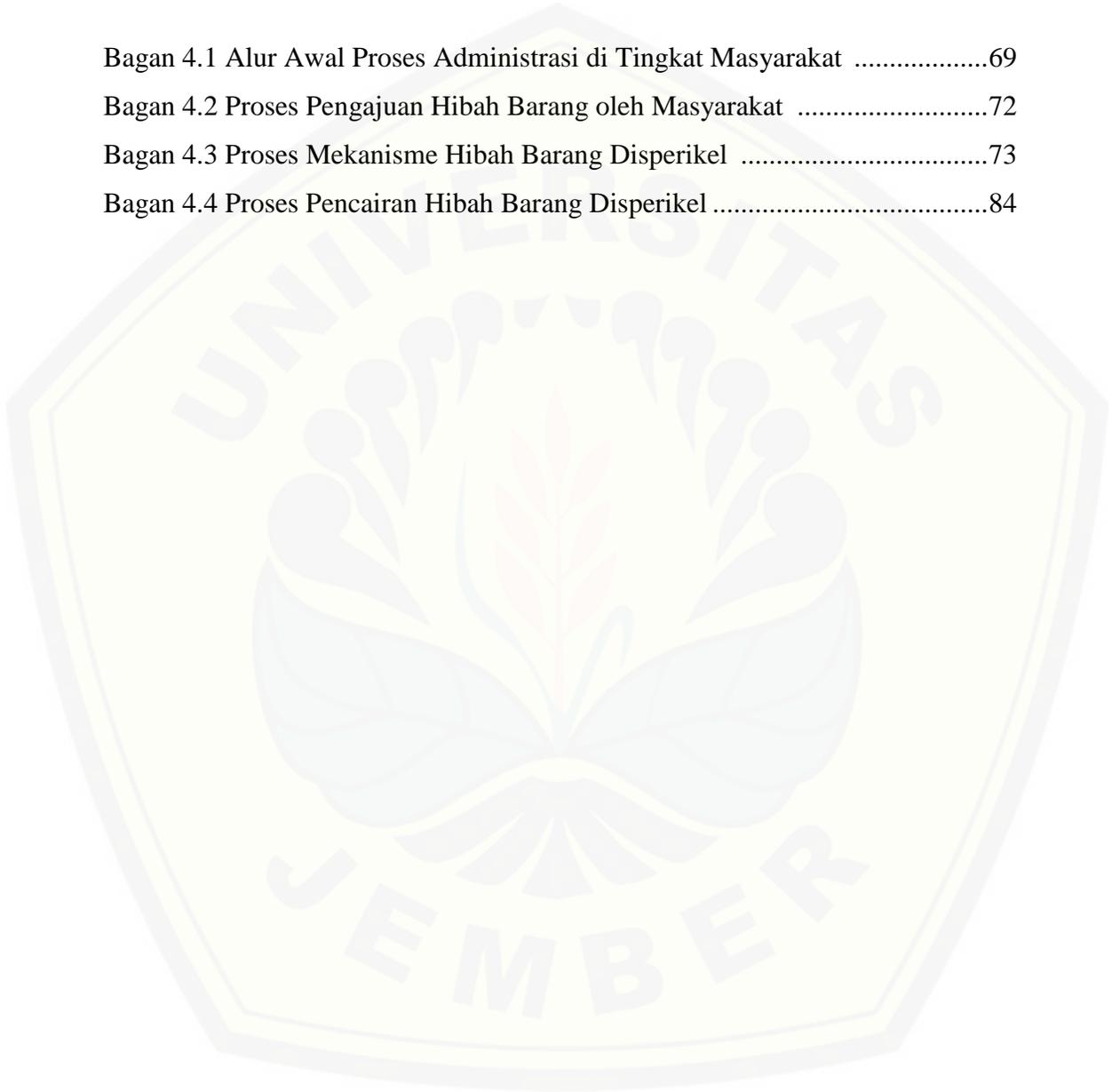


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan di Kab. Jember .....	1
Tabel 1.2 Produksi Daging Kab. Jember 2011-2015 .....	3
Tabel 1.3 Potensi Komoditas Peternakan Kab. Jember .....	3
Tabel 1.4 Daerah Sentra Komoditas Peternakan Kab. Jember .....	5
Tabel 1.5 Program dan Kegiatan Disperikel Kab. Jember .....	6
Tabel 3.1 Informan .....	36
Tabel 4.1 Persebaran Luas Wilayah Kecamatan di Kab. Jember .....	51
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kab. Jember Tahun 2010.....	54
Tabel 4.3 Daerah Sentra Pengembangan Komoditas Peternakan. ....	62
Tabel 4.4 Jumlah Populasi Ternak.....	62
Tabel 4.5 Jumlah Produksi Hasil Ternak .....	63
Tabel 4.6 IB Ternak .....	63
Tabel 4.7 Produksi Susu Ternak .....	64
Tabel 4.8 Produksi Telur.....	64

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 4.1 Alur Awal Proses Administrasi di Tingkat Masyarakat .....	69
Bagan 4.2 Proses Pengajuan Hibah Barang oleh Masyarakat .....	72
Bagan 4.3 Proses Mekanisme Hibah Barang Disperikel .....	73
Bagan 4.4 Proses Pencairan Hibah Barang Disperikel .....	84



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara geografis maupun demografi, siapapun akan mengakui bahwa Jember cukup potensial untuk dikembangkan. Dengan melihat batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, dan sosial budaya serta sumber daya manusia, Jember cukup memiliki kekuatan dan memiliki kompetensi untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya. Dengan luas wilayah 3.293,34 Km<sup>2</sup> (329.333,94 Ha) Kabupaten Jember terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan rincian seperti table di bawah ini.

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan Kabupaten Jember

No	Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan	121.039,61	36,75
2	Perkampungan	31.877,00	9,68
3	Sawah	86.568,18	26,29
4	Tegal	43.522,84	13,22
5	Perkebunan	34.590,46	10,50
6	Tambak	368,66	0,11
7	Rawa	35,62	0,01
8	Semak/padang rumput	289,06	0,09
9	Tanah rusak/tandus	1.469,26	0,45
10	Lain-lain	9.574,26	2,91
Jumlah		329.334,00	100,00

Sumber: LKJP Bupati Jember Tahun 2014

Dengan kondisi tersebut maka Kabupaten Jember terkenal dengan kondisi lahan pertanian dan perkebunan yang sangat subur. Oleh karena itu wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini sangat sesuai mengingat mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Jember adalah di sektor pertanian. Namun Kabupaten Jember tidak hanya memiliki potensi di sektor pertanian semata. Ada beberapa potensi seperti peternakan, perkebunan, perikanan, kelautan dan lain-lain yang siap dikembangkan dalam rangka menggerakkan pembangunan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Jember.

Berdasarkan potensi tersebut sektor peternakan adalah sektor yang cukup potensial untuk digerakkan secara massif sebab hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi pangan masyarakat akan daging yang seiring dengan pertumbuhan penduduk, meningkatnya pendapatan, pengetahuan dan kesadaran gizi masyarakat. Selain itu sebagian masyarakat Jember dikenal gemar memelihara hewan ternak, khususnya sapi potong atau “*Kereman*”. Ini merupakan suatu potensi, peluang dan nilai tambah bagi Kabupaten Jember dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah Jember yang sebagian besar berareal sawah, perkebunan, dan tegal merupakan faktor pendukung dalam menghasilkan penyediaan pakan ternak, wajar kalau animo masyarakat Jember untuk memelihara ternak cukup tinggi.

Tabel 1.2 Potensi Komoditas Peternakan/Perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2014

No	Kecamatan	Komoditas basis dari sektor /subsektor pertanian
		<b>Peternakan/Perikanan</b>
1	Ajung	Sapi potong
2	Ambulu	Sapi perah, sapi potong, kerbau, ayam petelur
3	Arjasa	Sapi perah, kambing
4	Balung	Ayam petelur, Sapi perah
5	Bangsalsari	Kambing, kuda, ayam buras, gurami, lele, nila
6	Gemuk emas	Sapi potong, sapi perah, kerbau, ayam buras, ayam pedaging, gurami, lele, nila
7	Jelbuk	Kambing
8	Jenggawah	Sapi potong
9	Jombang	Kerbau
10	Kalisat	Tombro, nila, ikan hias
11	Kaliwates	Sapi perah
12	Kencong	Babi, ayam pedaging
13	Ledokombo	Tombro, nila, ikan hias
14	Mayang	Tombro, nila, ikan hias
15	Mumbulsari	Kambing, domba, ayam petelur
16	Pakusari	Ayam pedaging
17	Panti	Domba, kambing, ayam petelur
18	Patrang	-
19	Puger	Sapi potong, domba, gurami, lele, nila
20	Rambipuji	Ayam pedaging, ayam petelur
21	Semoro	Gurami, nila, lele, babi
22	Silo	Sapi potong, domba, ayam buras, to,nro, nila, ikan hias
23	Sukorambi	Domba, ayam petelur

24	Sukowono	Ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, tombo, nila, ikan hias
25	Sumberbaru	Sapi potong, sapi perah, kambing
26	Sumberjambe	Sapi potong, ayam petelur, trombo, nial, ikan hias
27	Sumbersari	-
28	Tanggul	Sapi perah, ayam petelur, kuda, kambing
29	Tempurejo	Sapi potong, kambing, domba
30	Umbulsari	Ayam buras, babi, gurami, lele, nila, ayam pedaging
31	Wuluhan	Sapi potong, kambing, gurami, lele, nila

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember 2014

Peran strategis peternakan, perikanan, dan kelautan tersebut digambarkan melalui kontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), bahan baku industri dan turunannya, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Kabupaten Jember yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, peningkatan produksi hasil peternakan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penambahan populasi dan peningkatan mutu genetik ternak sapi potong untuk menjadikan Kabupaten Jember sebagai sentra ternak Sapi potong nasional. Upaya percepatan Pengembangan peternakan di Kabupaten Jember tersebut dilakukan pada sentra-sentra sebagai berikut.

Tabel 1.3 Daerah Sentra Komoditas Peternakan Jember

No	Komoditas	Daerah sentra ternak pada kecamatan
1	Sapi potong	Silo, Sumberjambe, Tempurejo, Gumukmas, Sumberbaru
2	Sapi perah	Kaliwates, Arjasa, Tanggul, Sumberbaru
3	Kambing	Mumbulsari, Bangsalsari, Sumberbaru, Tempurejo, Arjasa
4	Domba	Silo, Sukorambi, Mumbulsari, Tempurejo, Puger
5	Ayam Buras	Sukowono, Umbulsari, Gumukmas, Bangsalsari, Silo
6	Ayam Potong	Sukowono, Gumukmas, Kencong, Rambipuji, Pakusari
7	Ayam Petelur	Balung, Sumberjambe, Sukowono, Mumbulsari, Sukorambi

Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember 2014

Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Jember. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan juga untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Jember secara umum sebagai berikut.

1. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih, memiliki kinerja prima untuk mendorong kreatifitas dan produktivitas masyarakat
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan
4. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan aksesibilitas infrastruktur terutama di perdesaan. (Sumber: RKPD Kabupaten Jember 2014)

Pada tujuan ke empat (4) terdapat upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung terwujudnya sasaran seperti yang dijelaskan didalamnya yaitu menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan dengan sasaran meningkatkan populasi dan hasil produksi peternakan.

Ada 3 program dan 11 kegiatan yang mendukung terwujudnya sasaran tersebut yaitu:

Tabel 1.4 Tabel Program dan Kegiatan Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUMBER DANA
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.	APBD Kab.
		2. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.	APBD Kab. & DAK Pertanian
		3. Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan dan ikan.	APBD Kab.
		4. Pengamatan dan penyidikan penyakit hewan menular.	APBD Kab.
2	Program Peningkatan	1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak.	APBD Kab.

	Produksi Hasil Peternakan	2. Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak.	APBD Kab.
		3. Pengembangan agribisnis peternakan.	APBD Kab.
		4. Monitoring dan evaluasi dan pelaporan.	APBD Kab.
		5. Pengembangan sapi perah.	APBD Kab.
		6. Kegiatan peningkatan peran dan fungsi penyuluhan peternakan.	APBD Kab.
		3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

Sumber: LAKIP Kabupaten Jember 2014

Agar dapat merealisasikan seluruh program dan kegiatan tersebut Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember mendapat anggaran sebesar Rp 19.446.064.093,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung (gaji pegawai), Rp 6.081.430.858,00 (DAU) dan belanja langsung sebesar Rp 13.364.633.181,00 dengan rincian sumber dana sebesar APBD II sebesar Rp 4.962.153.181,00, DAK Rp 763.080.000,00 dan DBHCT sebesar Rp 2.636.400.000,00 dengan realisasi belanja langsung mencapai Rp 5.685.912.332,00 atau 97,28%.

Namun dari alokasi tersebut akan terasa jauh apabila ingin mewujudkan Kabupaten Jember sebagai sentra produk peternakan, perikanan, dan kelautan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu setiap tahunnya pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran belanja hibah. Pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah yang diberikan kepada penerima seharusnya benar-benar menunjang pencapaian sasaran serta kegiatan pemerintah daerah dan tidak untuk menunjang pencitraan kinerja pemerintah daerah.

Dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa

“Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

Namun seiring perjalanannya fenomena hibah dan bantuan sosial ini seringkali ditarik pada ranah kepentingan. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Bupati M.Z.A Djalal dalam sebuah kesempatan menjelaskan enam arah kebijakan belanja daerah tahun 2014. Pertama, memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Wujudnya adalah fasilitasi belanja penanganan kemiskinan, pelayanan dasar pendudukan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.

Kedua, menguatkan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Ketiga, memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan atau pendampingan kepada usaha mikro kecil menengah. Bantuan stimulasi pembangunan ekonomi, baik di sektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah. Keempat, melanjutkan proyek-proyek infrastruktur strategis yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat. Kelima, fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak, termasuk penanganan bencana alam. Terakhir, mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan proporsional, efisien, dan efektif.

Dalam mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial seharusnya pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hibah disesuaikan kepada kemampuan keuangan daerahnya sendiri dan harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib terlebih dahulu. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa:

“Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Di Kabupaten Jember, khususnya Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan yang notabene memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), bahan baku industri dan turunannya, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usaha peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan. Peran tersebut pada intinya mempunyai maksud mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Komitmen tersebut direalisasikan dengan diterbitkannya SK Bupati Jember Nomor 188.45/175.1/012/2014 dan Nomor

188.45/304/012/2014 tentang Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Dana Hibah pada Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember tahun 2014 bahwa kelompok tani ternak terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan bantuan hibah untuk kemudian di verifikasi oleh Disperikel sehingga dapat disetujui pencairan kegiatan belanja dana hibah kepada kelompok masyarakat.

Sebagai bentuk penerimaan dan belanja pemerintah, hibah harus dipertanggungjawabkan mengikuti mekanisme dan ketentuan dalam regulasi keuangan negara. Akuntabilitas tersebut tidak hanya terkait dari aspek akuntansi namun juga harus dimulai dari aspek penganggaran, mekanisme pengeluaran/penerimaan dana sampai dengan pelaporan kepada stakeholder. Menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang dinamis serta persoalan mendasar pada sektor peternakan, perikanan, dan kelautan seperti meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya daya konsumsi masyarakat terhadap hewan ternak, kemudian makin terbatasnya sumberdaya lahan, air, dan energi, perubahan iklim global, perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, masih terbatasnya akses peternak, pembudidaya ikan dan nelayan terhadap permodalan. Selain itu, tantangan kelembagaan Disperikel sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam sektor peternakan, perikanan, dan kelautan. Dalam pelaksanaannya, program hibah yang dilaksanakan Disperikel ternyata tidak mempunyai proses evaluasi dan indikator keberhasilan yang jelas. Ini semua di akui sendiri oleh kepala bagian kepegawaian Disperikel kabupaten jember. Hasil wawancara dengan Bpk Drs. Noer Faqih GH, Msi selaku kepala bagian kepegawaian Disperikel Kabupaten Jember pada tanggal 23 november 2015 pada pukul 14.11 WIB sebagai berikut:

“memang selama ini yang dilakukan Disperikel terkait dengan evaluasi pemberian hibah hanya sebatas pada serah terima hibah barang pada kelompok yang mendapatkan hibah sesuai SK bupati. Pihak Dinas mengakui belum ada indikator keberhasilan yang jelas terkait evaluasi pada hasil dari hibah itu sendiri yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan pada kelompok tersebut”

Menarik untuk diteliti dan dikaji proses pemberian program hibah untuk kelompok tani ternak. Sebab, seperti yang diketahui seringkali program hibah kerap kali dilakukan hanya berwujud formalisme namun tidak menyentuh motif utama untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan pembangunan peternakan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk peternakan serta membuka akses permodalan yang dapat memperkuat sektor usaha ekonomi produktif agar ke depannya generasi muda dapat meminati sektor ini untuk meminimalisir angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu apakah selama ini program hibah yang dilakukan oleh Disperikel Kabupaten Jember benar-benar tepat sasaran dan akuntabel, mengingat beratnya tantangan daerah untuk terus eksis dan berdaya saing. Dalam proses pelaksanaan apakah masyarakat sendiri yang memang tidak mampu mengelola dan hanya memanfaatkan hibah hanya untuk mencari keuntungan tanpa mengelola hasil hibah sesuai dengan tujuan program dana hibah kabupaten jember.

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiono (2001:35), rumusan masalah berbeda halnya dengan masalah. Jika masalah didefinisikan sebagai kesenjangan antar sesuatu yang diharapkan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Dengan kata lain, definisi masalah menurut Kountur (2003:35) yaitu pertanyaan yang mempersoalkan keberadaan suatu variabel pada suatu fenomena.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan rumusan masalahnya adalah Bagaimana proses pelaksanaan program hibah kepada kelompok ternak oleh Disperikel di Kabupaten Jember Tahun 2015?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran atas target yang ingin oleh peneliti dalam proses penelitian. Dengan adanya tujuan pula maka penelitian akan terarahkan kemana proses penelitian akan dibawa. Tanpa adanya tujuan yang jelas, penelitian akan menjadi tidak terfokus pada topik yang akan dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan terhadap

program pemberian hibah Dinas Peternakan, Perikanan, dan kelautan Kabupaten Jember tahun 2015.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan gambaran kegunaan suatu penelitian tersebut bagi kepentingan ilmu pengetahuan (akademik), pemerintah, dan kehidupan masyarakat luas. Manfaat penelitian didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut.

a. Bagi Dunia Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih maupun kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya referensi kepustakaan bagi pihak yang berkepentingan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input yang bermanfaat bagi pemerintah daerah melalui kepanjangan tangan di Disperikel Kabupaten Jember dalam proses pelaksanaan penyaluran program hibah. Mengingat selama ini, pemerintah daerah masih menjadi sentral dalam penyelenggaraan urusan publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan khazanah baru bagi pemerintah daerah terkait pola pelaksanaan yang prakteknya melibatkan banyak pihak.

c. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga muncul tanggapan kritis dari masyarakat untuk turut aktif dan partisipatif dalam membangun potensi dalam bidang peternakan. Melalui penelitian ini, masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana program hibah tersebut untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya beserta dampak yang dirasakan bagi kalangan masyarakat yang memiliki sumber daya untuk meningkatkan aktivitas ternak hewan maupun budi daya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan teori pada penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, teori bukan menjadi pedoman atau acuan, akan tetapi sebagai bekal pengetahuan dalam melakukan penelitian untuk selanjutnya diperbandingkan dengan hasil akhir penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2011:23), yaitu:

“sebagaimana stereotip dalam penelitian kualitatif, terkadang ketika suatu masalah kualitatif harus dipecahkan, peneliti cenderung dipengaruhi oleh stereotip teoritis kuantitatif dengan menggunakan teori untuk menjawabnya. Padahal, pada prinsipnya, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan induktif, dengan demikian teori sesungguhnya adalah alat yang akan diuji kemudian dengan data dan instrumen penelitiannya.”

Selanjutnya, Bungin (2011:24) mengklasifikasikan teoritisasi dalam penelitian kualitatif ke dalam beberapa model, yaitu sebagai berikut:

- a. Model deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, hingga menganalisis data. Model penggunaan teori ini biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.
- b. Model induksi, dimana teori bukan menjadi sebuah hal yang penting, akan tetapi data yang paling penting. Model ini digunakan pada penelitian deskriptif verifikatif, bahwa teori masih digunakan untuk memahami objek penelitian sehingga memudahkan pengumpulan data.

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mempunyai konsep dasar berupa teori yang akan digunakan sebagai bahan dalam mengkaji fenomena sosial yang kemudian dapat dijadikan landasan berfikir peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam landasan berfikir tersebut dapat menjadi dasar pemikiran seorang peneliti dalam mengupas sebuah permasalahan penelitian untuk dicari jawabannya.

Jika dapat digambarkan, bahwa teori tersebut yang akan menjadi penunjuk arah bagi peneliti, kemana arah penelitian akan dilakukan untuk mengkaji persoalan yang akan diteliti, sehingga alur penelitiannya dapat dengan jelas di ketahui alur dalam mencari jawaban atas perumusan masalahnya.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model deduksi dalam penggunaan teori. Peneliti masih menganggap penting sebuah teori untuk merumuskan masalah hingga menuntun peneliti saat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep yang dirasa dapat mewakili rumusan masalah yang hendak dijawab, sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah
2. Kebijakan publik
3. Implementasi
4. Hibah
5. Kelompok Masyarakat

## **2.1 Otonomi Daerah**

Otonomi daerah bertujuan mengembangkan daerah berdasarkan potensi, preferensi dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat. Undang-undang No. 32 tahun 2004 berkenaan dengan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Otonomi tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber

keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Undang-undang No.33 tahun 2004). Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara pusat-daerah dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawabannya. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran dinas berbasis prestasi kerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk akuntabilitas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka konsep otoda digunakan dalam penelitian ini karena otonomi daerah bertujuan mengembangkan daerah berdasarkan potensi, preferensi dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat setempat pada sektor peternakan. Implikasinya dari otoda adalah pengaturan pada pendanaan, yang kewenangannya diserahkan kepada daerah dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri melalui program hibah barang Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Jember.

## 2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek yang terarah (Islamy, 1984:15). Sementara itu Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-

peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Mirip dengan definisi Friedrich diatas, James Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Wahab, 2004:3). Dapat disimpulkan dari berbagai pengertian di atas, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Dalam prakteknya kata kebijakan seringkali mempunyai dua pilihan dalam penggunaannya, yaitu kebijakan negara dan kebijakan publik yang secara substantif tidak ada perbedaan diantara keduanya. Thomas R. Dye dalam Irfan Islamy (1984:18) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pengertian ini mirip dengan yang diartikan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Irfan Islamy (1984:18) yaitu apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Berkaitan dengan definisi kebijakan yang telah dikemukakan sebelumnya, Anderson dalam Irfan Islamy (1984:19) mengatakan bahwa kebijaksanaan negara adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Masih menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut adalah:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijaksanaan negara berisi tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah;
3. Kebijaksanaan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksudkan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu;
4. Kebijaksanaan negara bisa bersifat positif maupun negatif;

5. Kebijaksanaan negara setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Sifat kebijaksanaan yang otoritatif ini hampir sama dengan definisi kebijaksanaan negara yang disampaikan oleh David Easton dalam Irfan Islamy (1984:19), yaitu pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Perlu diketahui bahwa kebijakan publik (*public policy*) ini muncul disebabkan oleh tiga hal, antara lain:

1. karena ada tuntutan dari bawah atau dari masyarakat,
2. adanya kepentingan dari elite penguasa, dan
3. ada konflik dalam masyarakat.

Jadi kebijakan publik muncul untuk mengakomodir kepentingan masyarakat maupun untuk menyelesaikan masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dapat didefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan (1) bagaimana pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (2) mengapa pemerintah melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, (3) apa akibat dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah tersebut tentunya dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan publik. Dari beberapa pengertian kebijaksanaan negara atau kebijakan publik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (*public policy*) itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Dalam konteks ini peneliti memasukkan konsep kebijakan publik karena hibah barang kepada kelompok tani ternak adalah kebijakan Disperikel yang dapat dipandang sebagai suatu tindakan pemerintah akibat disebabkan karena ada tuntutan dari bawah/masyarakat dan juga hasil telaah obyektif akan potensi Kab. Jember pada

sektor peternakan sehingga dalam arti yang positif hibah barang kepada kelompok tani ternak ini memiliki dasar dan landasan otoritatif yang mengatur kebijakan tersebut.

## 2.3 Implementasi

### 2.3.1 Pengertian Implementasi

Tahap implementasi dalam lingkaran proses kebijakan publik, menempati posisi yang penting karena kebijakan akan dikatakan berhasil atau tidak tergantung pada implementasinya. Bahkan Ujodi (dalam Solichin A. Wahab, 1997:59) dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Presman dan Widavsky (dalam Solichin A. Wahab, 1997:65) menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Bagi kedua pelopor studi implementasi ini maka proses untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus. Agak mirip pandangan kedua ahli di atas Van Meter dan Van Horn (dalam Samodra Wibawa, 1994:15) merumuskan implementasi sebagai berikut:

”tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Solichin A. Wahab, 1997:65) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

“memahami apa yang senyatanya terjadi sesudahnya suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencukupi baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat oleh kejadian-kejadian.”

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan terhadap suatu kebutuhan yang telah ditetapkan dengan berbagai sumber daya yang ada, untuk mencapai tujuan dan memberikan dampak. Dalam hal ini mengimplementasikan suatu keputusan-keputusan dapat merupakan suatu program yang diproyeksikan dari tujuan nilai- nilai dan praktik-praktik tindakan.

Suatu kebijakan agar dapat mencapai suatu tujuan dapat diimplementasikan dengan berbagai model, diantaranya:

### 2.3.2 Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi diantaranya adalah perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi, seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme-mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur, (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan), dan seberapa pentingkah rasa keterikatan

masing-masing orang dalam organisasi (hal ini menyangkut masalah kepatuhan). Atas dasar pandangan seperti itu Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut:

1. Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Samodra Wibawa (1994:19-21) faktor-faktor yang berpengaruh tersebut antara lain:

1. Standar dan sasaran  
Standar dan sasaran harus dirumuskan secara spesifik dan konkret seringkali suatu kebijakan memiliki tujuan yang luas dan kabur sehingga akan menyusahakan proses implementasinya.
2. Kinerja kebijakan  
Merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Sumber daya baik SDM, SDA maupun sumber daya modal.  
Kinerja suatu kebijakan akan rendah jika sumber daya yang diperlukan tidak disediakan oleh pemerintah. Persoalannya adalah berapakah sumber daya minimal yang harus tersedia untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.
4. Komunikasi antara organisasi dan aktivitas penguatan  
Kejelasan standar dan sasaran belum menjamin keberhasilan suatu kebijakan tanpa adanya komunikasi. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang telah menjadi tanggung

jawabnya. Komunikasi berkaitan dengan kewenangan dan kepemimpinan antara atasan dan bawahan.

5. Karakteristik birokrasi pelaksana meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual. Pada dasarnya organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang harus diperhatikan yaitu kompetensi dan jumlah staf, rentang dan derajat pengendalian, dukungan politik yang dimiliki, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi serta keterkaitan dengan pembuat kebijakan.
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik  
Ini berkaitan dengan lingkungan sistem dari kebijakan itu berada yang berpengaruh pada efektivitas implementasi kebijakan.
7. Sikap pelaksanaan  
Sikap pelaksana akan membentuk seberapa tinggi kinerja kebijakannya yang terwujud dalam bentuk respons yang mereka berikan terhadap suatu kebijakan. Respon individu pelaksanaan inilah yang menjadi penyebab berhasilnya dan gagalnya proses implementasi.

Menurut Grindle (dalam Samodra Wibawa, 1994:22), Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan  
Kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda lebih sulit diimplementasikan dibandingkan yang menyangkut sedikit kepentingan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan  
Kebijakan yang memberikan manfaat yang aktual tidak hanya formal, ritual dan simbolis kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding yang kurang bermanfaat.
3. Derajat perubahan yang diinginkan  
Kebijakan yang mensyaratkan adanya perubahan sikap dan perilaku biasanya sulit diimplementasikan. Kebijakan yang mempunyai tujuan

jangka panjang juga lebih sulit diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang mempunyai tujuan jangka pendek. Manfaat kebijakan dipengaruhi oleh perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.

4. Kedudukan pembuat kebijakan

Posisi pembuat kebijakan akan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya karena kedudukan pelaku memiliki pusat kekuasaan yang berbeda.

5. Pelaksana Program

Orang-orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tingkat keahlian, dedikasi, kemampuan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kebijakan yang ditanganinya.

6. Sumber daya yang dilibatkan

Sumber yang digunakan dalam program, bentuk, besar, dan asal sumber daya akan menentukan pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan. Sumber daya yang diperlukan selama proses kebijakan berlangsung. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi sebagaimana pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik seperti yang dijelaskan dalam model Van Meter dan Van Horn.

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, pengusaha, kelompok sasaran, dan para pelaksana program akan bercampur-baur mempengaruhi efektivitas implementasi.

### 2.3.3 Model Implementasi Sabatier dan Mazmanian

Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud Sabatier dan Mazmanian (dalam Samodra Wibawa, 1994:25-27) dibagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Karakteristik masalah

Termasuk didalamnya adalah ketersediaan teknologi dan teori teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan. Kejelasan tujuan/sasaran, teori kausal yang memadai, sumber keuangan yang mencukupi, integrasi organisasi pelaksana, diskresi pelaksana, rekrutmen dari pejabat pelaksana, akses formal pelaksana ke organisasi lain.

3. Faktor-faktor di luar peraturan

Kondisi sosio ekonomi dan teknologi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

Setelah semua faktor tersebut terpenuhi, pada tahap implementasi para pejabat pelaksana dan kelompok sasaran harus mematuhi program. Tanpa kepatuhan mereka, tujuan tidak akan pernah tercapai.

#### 2.3.4 Tinjauan Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. *Resouces* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut sehingga kaitan dengan penelitian ini adalah pelaksana dari hibah barang adalah Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Jember, yang dalam implementasinya didukung oleh faktor-faktor penunjang pelaksanaan dan terdapat unsur penting pada kelompok masyarakat (kelompok tani ternak) yang menjadi sasaran dan menerima manfaat dari program hibah barang Disperikel Kab. Jember.

#### **2.4 Belanja Hibah**

Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan

banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan terutama menjelang adanya pemilihan umum kepala daerah, dimana terdapat kecenderungan bantuan hibah digunakan sebagai alat politik pencitraan oleh kepala daerah/wakil kepala daerah, terutama kepala daerah incumbent yang mencalonkan dirinya kembali dalam ajang pemilihan umum kepala daerah untuk periode kedua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dan dalam *menggolkan* kepala daerah/wakil kepala daerah yang sedang menjabat. Berbagai praktek modus yang digunakan melalui penganggaran dalam APBD maupun anggaran dinas sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepat sasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut secara riil dan rasional.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa

“Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemdagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, netralitas dan manfaat untuk masyarakat (Darmastuti dan Dyah, 2011).

Menurut Permendagri nomor 59 tahun 2007 belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme keuangan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria alokasi belanja hibah antara lain adalah

1. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna

- memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;
  3. Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  4. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kaitan dengan penelitian ini hibah daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah hibah barang yang dikelola oleh Disperikel dengan mengacu mekanisme pengaturan soal hibah daerah. Hibah barang ini memiliki mekanisme dan prosedur yang mengatur pemberian serta pelaksanaan hibah tersebut dengan melibatkan kelompok masyarakat tani ternak sebagai sasaran hibah barang Disperikel Kab. Jember.

### **2.5 Kelompok Tani Ternak**

Kelompok tani ternak adalah kelompok tani yang beranggotakan peternak peternak atau pemelihara ternak dan di masyarakat lebih dikenal dengan kelompok ternak (Rusidi, 1978). Biasanya komoditas ternak yang dipelihara adalah sejenis sehingga memunculkan kelompok ternak sapi, kelompok ternak kambing, kelompok ternak domba, kelompok ternak ayam dan sebagainya. Namun, juga tidak jarang kelompok ternak tersebut juga mengelola berbagai macam ternak. Menurut Kartasapoetra (1994), kelompok tani ternak bukan hanya sekumpulan anggota yang memiliki keinginan dan kepentingan bersama yang tergabung dalam

sebuah wadah kelompok tani akan tetapi juga sebagai sarana untuk pengembangan diri dalam berorganisasi dan pengembangan ternaknya. Kelompok menjadi wadah kelas belajar mengajar yang didalamnya setiap anggota memperoleh pengetahuan sehubungan dengan bidang usaha yang ditekuni dan sumber pembelajarannya dapat berasal dari sesama anggota, kelompok lain, lembaga swasta maupun pemerintah. Anggota dapat menarik manfaat yang lebih baik dengan berkelompok daripada ketika tidak berkelompok. Kelompok tani ternak yang baik mampu mengembangkan diri dengan selalu kreatif dan berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Kelompok yang demikian memiliki kegiatan yang penuh variasi sehingga keberadaan kelompok sangat mendukung untuk peningkatan kesejahteraan anggota.

Variasi kegiatan kelompok tani ternak, berupa pengolahan pakan ternak dari limbah pertanian, pengawet dan pakan ternak, peningkatan angka kelahiran ternak dengan penerapan teknologi reproduksi modern berupa embrio transfer dan inseminasi buatan, pengolahan kotoran ternak menjadi pupuk organik, pengolahan kotoran ternak menjadi energi terbarukan berupa biogas dan sebagainya.

Dalam kaitan penelitian ini kelompok tani ternak yang menjadi sasaran hibah barang Disperikel Kab. Jember adalah kelompok tani ternak yang telah memiliki kelengkapan persyaratan administratif seperti:

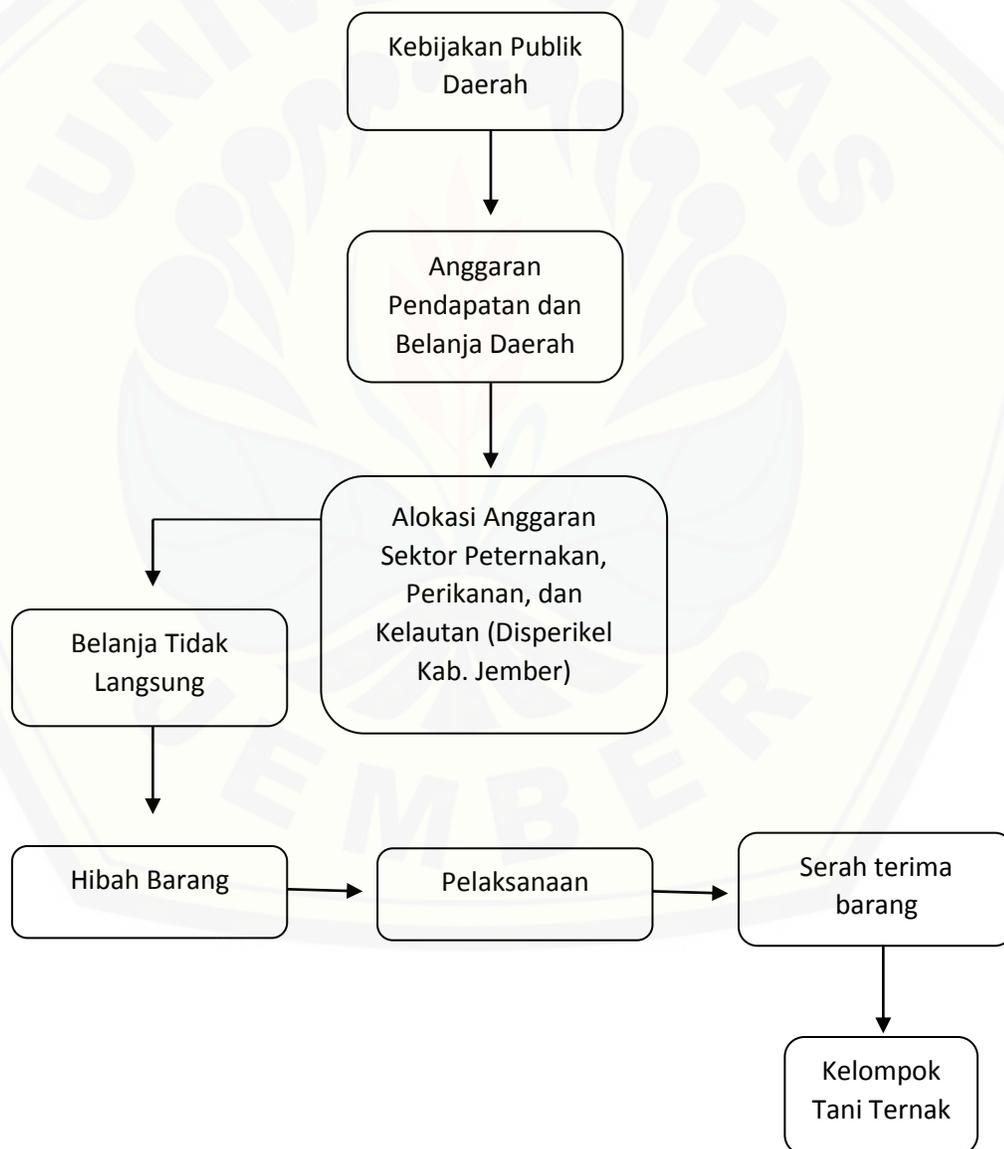
1. Surat Keputusan (SK) pembentukan yang diterbitkan oleh Kepala Desa tempat kelompok tani ternak berdomisili;
2. Akte pendirian kelompok tani ternak;
3. SKT dari Bakesbangpol Kab. Jember;
4. Profil kelompok tani ternak.

Kelengkapan administratif tersebut menjadi syarat dasar yang harus dipenuhi oleh kelompok tani ternak yang ingin atau akan mendapat hibah barang dari Disperikel. Selain itu, kelengkapan administratif tersebut menjadi penanda bahwa kelompok tani ternak tersebut dikelola secara professional dan akuntabel.

## 2.6 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran yang dirancang dalam suatu kerangka berfikir yang diharapkan dapat member jalan bagi proses menjawab dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sehingga peneliti mampu mencapai tujuan penelitian yang diharapkan. Kerangka berfikir dibuat peneliti dalam bentuk bagan seperti di bawah ini:

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah penelitian karena suatu penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Dapat dikatakan pula bahwa hasil sebuah penelitian akan sangat bergantung dengan metode penelitiannya. Menurut Usman dan Akbar (2003:42) metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sugiyono (2011:2) berpendapat bahwa metode penelitian sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud dalam hal ini adalah cara-cara yang sifatnya rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitiannya. Peneliti akan dapat menemukan jawaban atas masalah penelitian jika peneliti mampu menggunakan metode penelitian yang tepat untuk mengupas masalah dan mengemukakan sesuatu yang masih belum jelas.

Berdasarkan pengertian metode penelitian di atas maka alur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. tipe penelitian
2. fokus penelitian
3. lokasi penelitian
4. teknik penentuan informan
5. teknik pengumpulan data
6. teknik analisis data
7. teknik pemeriksaan keabsahan data

#### 3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang dikaitkan pada topik yang akan diteliti, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan

jenis penelitian deskriptif. Bogdan dan Taylor (disitir oleh Andi Prastowo, 2012:22) menyatakan bahwa

“metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut keduanya, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara menyeluruh (holistik). Ini berarti bahwa individu tidak boleh diisolasi atau diorganisasikan ke variabel atau hipotesis, namun perlu dipandang sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.”

Metode kualitatif mendasarkan pada filsafat fenomenologis yang lebih mengutamakan penghayatan, sehingga berusaha memahami dan menginterpretasi makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.

Terkait dengan jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga secara utuh, penelitian ini disebut penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipandang lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam mengungkapkan hal yang belum jelas berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan hibah barang oleh Disperikel kepada kelompok tani ternak di Kabupaten Jember. Penelitian yang peneliti lakukan benar-benar berdasarkan fakta pengamatan yang ada di lapangan.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat fokus penelitian, terutama pada penelitian kualitatif. Fokus penelitian digunakan sebagai pembatasan studi, hal tersebut dilakukan agar sebuah penelitian tetap fokus dan tidak terlalu melebar. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada Disperikel yang melaksanakan hibah barang kepada kelompok tani ternak di Kab. Jember.

### **3.3 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah proses pelaksanaan hibah barang oleh Disperikel kepada kelompok tani ternak di Kabupaten Jember

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan kegiatan penelitian serta kegiatan-kegiatan lain untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tentunya lokasi-lokasi yang berhubungan erat dengan penelitian serta lokasi yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Adapun lokasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah di Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan (Disperikel) yang terletak di Jalan Letjen Suprpto No. 139 Kabupaten Jember.

Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2015 namun dengan rentang waktu sasaran penelitian pada tahun 2015 untuk memberikan gambaran terkait proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Disperikel atas kelompok tani ternak dalam pemberian hibah barang di Kabupaten Jember.

### **3.5 Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian. Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland yang dikutip Moleong (2001:112) menyatakan bahwa:

“Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan sebagainya adalah data tambahan seperti dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan lain-lain”

Adapun sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 3.5.1 Data Primer

Data primer adalah data-data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang diteliti tanpa perantara. Data primer sangat penting dalam penelitian karena merupakan data utama yang penting, yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Dalam penelitian ini, informan yang diambil peneliti adalah informan yang terkait dan terlibat langsung dalam proses pelaksanaan hibah barang kepada kelompok tani ternak di Kabupaten Jember yaitu Narasumber 1 (Jabatan/posisi), Narasumber 2 (Jabatan/posisi), Narasumber 3 (Jabatan/posisi), Narasumber 4 (Jabatan/posisi).

### 3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yaitu data yang telah terbentuk dalam dokumen-dokumen yang diperoleh dari instansi terkait dan dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data sekunder dapat berupa dokumen, catatan, laporan, majalah ilmiah, makalah, karya tulis ilmiah, dan sebagainya yang mendukung penelitian.

Adapun data-data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember.
- d. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember
- e. Salinan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/221/012/2015 tentang Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah pada Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kabupaten Jember Tahun 2015.

### 3.6 Informan Penelitian

Narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian (Andi, 2012:195). Informan dalam metode kualitatif terus berkembang (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap jenuh (hasil tetap). Alat pengumpul data atau instrumen dalam metode ini adalah peneliti sendiri, oleh karena itu peneliti menjadi instrumen kunci, sehingga ketika mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Menurut Moleong dalam Andi Prastowo secara lebih spesifik, informan adalah “orang-dalam” pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Andi, 2012:195). Oleh karena itu, informan adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan penelitian dilakukan dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Moleong dalam Andi Prastowo (2012:196) ada lima persyaratan agar seorang layak dijadikan informan penelitian:

- a. Orang tersebut harus jujur dan bisa dipercaya
- b. Orang tersebut memiliki kepatuhan pada peraturan
- c. Orangnyanya suka berbicara, bukan orang yang sukar berbicara apalagi pendiam
- d. Orang tersebut bukan termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian
- e. Orangnyanya memiliki pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan kriteria yang disampaikan oleh Moleong dalam Andi Prastowo. Peneliti telah menetapkan enam informan dan telah mewawancarai enam informan yang terpilih, dengan pertimbangan kriteria diatas, dan keempat informan ini merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dan mengetahui secara detail bagaimana proses pelaksanaan hibah barang oleh Disperikel kepada kelompok tani ternak di Kabupaten Jember tahun 2015.

Tabel 3.1 Informan

Informan	Alasan
<b>Drs. Noer Faqih. GH, M,SI (Kasubag Umum dan Kepegawaian Disperikel Kab. Jember)</b>	Pihak Disperikel yang membuat dan mengecek prosedur administratif hibah barang
<b>Firas chalid, SH (Kepala Bidang Peternakan Disperikel Kab. Jember)</b>	Pihak Disperikel yang melakukan verifikasi lapangan untuk dilakukan tindak lanjut
<b>Ir. Eko Harianto (Kasie Budidaya dan Pengembangan Ternak Disperikel Kab. Jember)</b>	Pihak Disperikel yang melakukan monev setelah hibah barang disalurkan kepada kelompok ternak
<b>Bapak Abdurrohman (Ketua Kelompok Tani Ternak Annur)</b>	Pihak kelompok ternak yang menerima bantuan hibah barang
<b>Samsul Hadi (Ketua Kelompok Tani Mandiri)</b>	Pihak kelompok ternak yang menerima bantuan hibah barang

### 3.7 Teknik dan Alat Perolehan Data

Teknik dan alat perolehan data sesuai dengan pengertian dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2010:24) merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang akan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Kualitas data tergantung kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi orang yang mengambil data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Peneliti

harus menerima menurut apa adanya. Dalam penelitian ini, teknik dan alat perolehan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara (interview)

Menurut Sugiyono dalam Andi Prastowo (2012:212), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Atau dengan kata lain, pengertian wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo. 2012:212). Menurut Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semi terstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semi terstruktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Maksud dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data (informasi) tentang obyek penelitian yang memadai secara langsung dari kata-kata dan tindakan informan, kemudian data dan hasil wawancara tersebut dicatat.

Adapun informasi-informasi yang hendak digali dari wawancara tersebut antara lain:

1. Bentuk hibah diejawantahkan dalam bentuk apa?
2. Adakah indikator keberhasilan pada program hibah Disperikel?
3. Mulai kapan hibah barang tersebut berlangsung?
4. Bagaimana pengelolaannya dan prosedur mekanisme hibah tersebut?
5. Mengapa Disperikel melakukannya?
6. Bagaimana proses pelaksanaan hibah barang yang terjadi?
7. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi?
8. Apa dampak dan manfaat yang diterima oleh kelompok tani ternak?

#### b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Prastowo (2012:220), Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sugiyono (2011:226) pada jenis penelitian ini, peneliti akan mendatangi kepada sumber data terkait dengan maksud dan tujuan dalam rangka melakukan penelitian. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pada suatu saat peneliti juga melakukan observasi yang tersamar untuk menghindari proses penyimpanan data yang dilakukan secara rahasia oleh sumber data. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera atau media rekam lainnya untuk mendokumentasikan hasil observasi peneliti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang menjelaskan hal ikhwal mengenai pemberian hibah Disperikel kepada kelompok tani ternak di Kab. Jember, LAKIP Disperikel, Dokumen Proposal pengajuan hibah barang. Selain itu, dokumentasi berupa foto, catatan, dan hasil rekaman proses observasi dan wawancara dapat juga dijadikan sebagai salah satu dokumen penting yang mendukung penelitian ini.

### 3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

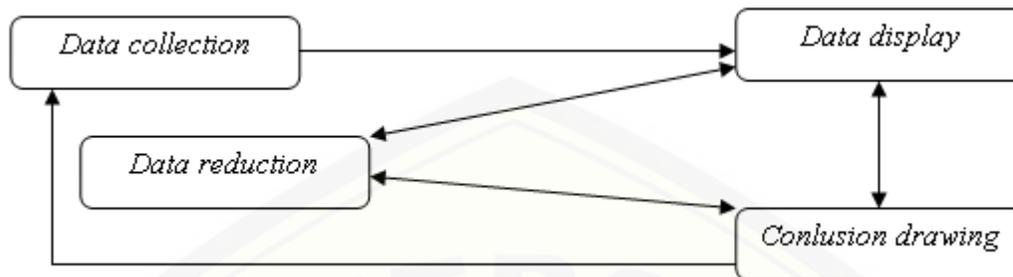
Teknik penyajian dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2010:24), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Menurut Prastowo (2012:237), berbicara tentang

teknik penyajian dan analisis data pada penelitian kualitatif artinya berbicara tentang mengolah dan melakukan analisis data kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Huberman. Dalam analisa data kualitatif model interaktif yang digunakan peneliti, merupakan upaya terus menerus yang mencakup tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis yang saling susul menyusul dan senantiasa merupakan bagian dari hasil lapangan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah berupa teks yang bersifat naratif, gambar, tabel, dan angka.

Menurut Miles and Huberman yang dikutip dari Idrus (2009:148) model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, analisis data dapat dilakukan melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga tahapan tersebut dianalisis secara lebih mendalam sehingga memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus melakukan proses coding. Tahap analisis data yang diterakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data untuk menjaga validitas data yang ada sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Senada dengan pendapat di atas, Miles dan Huberman yang dikutip dari Prastowo (2012:241), membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan, yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen tersebut dapat divisualisasikan ke dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman,



Sumber: Miles dan Huberman (2007:20) yang dikutip dari Andi Prastowo (2012:243)

Gambar 3.1 di atas memberikan gambaran terkait proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Analisis data terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), pengambilan kesimpulan/verifikasi. Menurut Denzin dan Lincoln (2009:592) menjelaskan bahwasanya proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, persisnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian, sewaktu proses pengumpulan data sementara dan analisis awal, serta setelah tahap pengumpulan data akhir. Denzin dan Lincoln (2009:592) mencoba menjelaskan terkait reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), pengambilan kesimpulan/verifikasi, sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data berarti bahwa kesemestaan potensi yang dimiliki oleh data dilakukan penyederhanaan. Hal ini dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data, pengodean, merumuskan tema-tema, pengelompokan, dan penyajian cerita secara tertulis. Dengan kata lain, proses reduksi data berjalan selama pengumpulan data berlangsung dilakukan secara terus menerus sejalan dengan penelitian berlangsung, bahkan proses ini terjadi setelah penelitian lapangan berakhir

dan laporan akhir tersusun dengan lengkap. Proses reduksi data ini dapat dilakukan dengan memilah-milah data dan mencari pola yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian.

b. *Data display* (penyajian data)

*Data display* (penyajian data) merupakan konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dalam tahap analisis. Penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi data sebagai dasar pemaknaan. Dengan mencermati kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, matriks dengan teks daripada angka.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data model interaktif menurut (Miles dan Huberman, 1992) menyatakan bahwa dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi penetapan makna dari data yang tersaji. Cara yang dapat digunakan akan semakin banyak, seperti metode komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan, metode triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temun-temuan.

### 3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian teknik untuk menguji keabsahan data menjadi sangat penting agar temuan hasil penelitian yang didapat oleh seorang peneliti dapat dipercaya atau diakui validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian dapat dikatakan valid jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Untuk itu dirasa sangat perlu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik menguji keabsahan data sebagai salah satu metode penelitian. Dalam melakukan pengujian keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk teknik pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data dengan melakukan *cross check* data, misalnya peneliti telah mendapatkan data menggunakan teknik wawancara dengan salah satu informan, kemudian data yang diperoleh dari informan akan dilakukan pengecekan ulang dengan data lain misalnya saja dengan menggunakan dokumen, atau wawancara dengan informan lain, dan lain-lain. hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

#### 1. Perpanjangan Observasi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus dapat terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang valid dan yang dapat menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Seorang peneliti kualitatif relatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses terjun langsung untuk mengumpulkan data. Dari proses menguji keabsahan data, perpanjangan keikutsertaan peneliti artinya menambah waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperpanjang waktu seorang peneliti untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data yang jenuh dalam penelitiannya. Peneliti melakukan penelitian awal dilakukan pada tanggal 1 April 2015 sampai 30

April 2015 dan setelah dilakukannya seminar proposal penelitian pada tanggal 6 Mei, penelitian dilakukan kembali mulai 2 Juli 2015 sampai 2 September 2015 untuk memperdalam hasil penelitian. Bahkan dilakukan penelitian lagi untuk memperdalam hasil penelitian sejak 17 September 2015 sampai 1 Desember 2015

2. Ketekunan atau keajegan pengamatan.

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah didapatkan. Peneliti dalam penelitian ini secara konsisten melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan aktor-aktor yang terlibat dalam pemberian hibah barang oleh Disperikel Kabupaten Jember. Ketekunan atau keajegan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam mengamati objek penelitiannya sehingga dapat diketahui proses pelaksanaan hibah barang oleh Disperikel kepada kelompok tani ternak di Kabupaten Jember.

3. Triangulasi.

Triangulasi adalah menguji kejujuran, kemampuan merekam data yang diperoleh di lapangan. Triangulasi juga bisa digunakan berdasarkan sumber data yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan berbagai pendapat, situasi, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Denzin (dalam Moleong, 2006:330) ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. Berikut adalah empat macam triangulasi yang diungkap oleh Denzin.

- a. Data triangulation (sumber), teknik yang menggunakan beberapa sumber data yang berbeda untuk pengumpulan data yang sama
- b. Investigator triangulation (penyidik), adalah pengumpulan data sejenis yang dikumpulkan oleh beberapa orang peneliti

- c. Methodological triangulation (metode) adalah penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.
- d. Theoretical triangulation (teori) yaitu peneliti melakukan penelitian dengan topik yang sama dan data yang dianalisis dengan menggunakan perspektif.

Dari keempat macam triangulasi diatas, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mencari kebenaran yang diungkapkan informan satu dengan informan yang lain. Peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada setiap informan. Mereka sama-sama menjawab bahwa terdapat pemberian hibah barang Disperikel dan kemudian kelompok tani ternak mengajukan proposal pengajuan hibah untuk mengakses hibah barang tersebut. Hibah barang ini kemudian berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Hibah barang ini diteruskan kepada kelompok tani ternak yang membutuhkan dan mengajukan untuk dikelola dan dilaksanakan pada aras kelembagaan lokal/daerah (Disperikel Kab. Jember). Pemberian hibah barang ini dilakukan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan mendukung pengembangan potensi strategis dalam sektor peternakan di Kab. Jember.

#### 4. Menggunakan bahan referensi

Referensi sangat diperlukan dalam mencari data yang diinginkan, sehingga peneliti dapat terbantu untuk menginterpretasikan data yang diperoleh. Melalui referensi peneliti dapat mengetahui tanpa harus membuang waktu lama untuk terjun langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data yang diinginkan.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Proses pemberian bantuan hibah barang oleh Disperikel dilakukan dengan mekanisme pengajuan proposal dari kelompok tani ternak yang ingin mengakses dan mendapatkan bantuan hibah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh mekanisme hibah barang
2. Pelaksanaan program hibah barang tersebut melalui proses verifikasi oleh Disperikel Kab. Jember dan kemudian diajukan untuk diterbitkan SK Bupati
3. Proses penandatanganan NHPD dilakukan oleh Kepala Disperikel dan kelompok tani ternak penerima hibah
4. Anggaran hibah tersebut bersumber dari anggaran Disperikel dari pos mata anggaran hibah barang yang bersumber dari APBD Kab. Jember. Adapun proses pelaksanaan hibah barang meliputi beberapa tahap, antara lain:
  - a) *Verifikasi*. Verifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Disperikel sebagai pelaksana hibah barang untuk kelompok tani ternak. *Pertama*, verifikasi administrasi proposal pengajuan bantuan kelompok tani ternak. *Kedua*, verifikasi lapangan oleh tim Disperikel untuk meninjau lokasi keberadaan kelompok tani ternak. *Ketiga*, setelah semua dokumen administratif telah sesuai maka menuju ke tahap berikutnya untuk ditindaklanjuti pada level Dinas dan Bupati.
  - b) *Pelaksanaan*. Pelaksanaan hibah barang ini adalah Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Jember. Dalam pelaksanaan hibah tersebut mengacu pada mekanisme hibah yang diatur oleh peraturan di tingkat daerah agar berjalan sistematis, administratif, prosedural sesuai tujuan dan visi Kabupaten Jember pada sektor peternakan dan ekonomi. Secara umum pelaksanaan hibah barang kepada kelompok tani ternak meliputi:

- (1) Dinas memasukkan nilai usulan proposal ke dalam DPA Disperikel pada pos anggaran hibah barang, (2) Disperikel mengajukan persetujuan kepada Bupati untuk mendapatkan SK Bupati tentang kelompok tani ternak yang akan menerima hibah barang, (3) pengadaan barang dilakukan oleh pihak ketiga, (4) Disperikel menyiapkan NPHD untuk ditandatangani ketua kelompok tani ternak yang menerima hibah barang, (5) Serah terima barang oleh Kepala Disperikel Kab. Jember.
- c) Monev. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas ke kelompok ternak yang menerima hibah barang untuk diberi pembinaan, penyuluhan, dan pengecekan berkala atas hasil ternak.

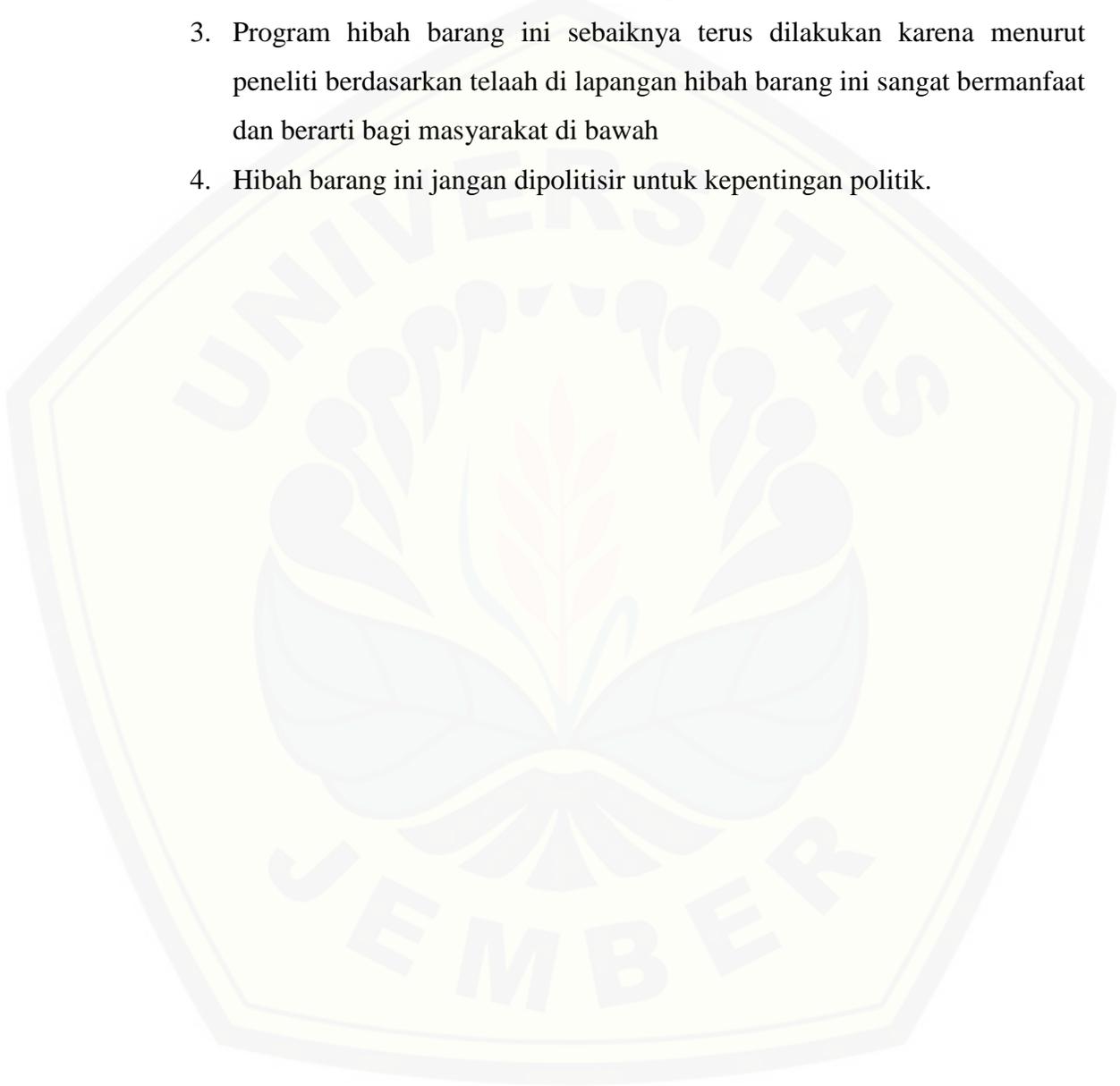
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya program hibah barang merupakan salah satu bagian untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di sektor peternakan. Selain itu kegiatan hibah barang ini ditujukan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, memanfaatkan potensi Kab. Jember di sektor peternakan, dan menjadikan Kab. Jember sebagai sentra ternak nasional.

Siapapun kelompok masyarakat dapat mengakses bantuan hibah barang asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sekaligus menjadi kelompok ternak binaan dari Disperikel.

## 5.2 Saran

1. Proses pelaksanaan pemberian hibah seharusnya melalui mekanisme yang profesional sebab program hibah ini sangat rawan dengan unsur KKN yang rentan berlawanan dengan hukum sehingga harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel

2. Sasaran kelompok tani ternak seharusnya berasal dari kelompok yang benar-benar membutuhkan dan dari daerah yang prospek untuk dikembangkan menjadi daerah sentra peternakan
3. Program hibah barang ini sebaiknya terus dilakukan karena menurut peneliti berdasarkan telaah di lapangan hibah barang ini sangat bermanfaat dan berarti bagi masyarakat di bawah
4. Hibah barang ini jangan dipolitisir untuk kepentingan politik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bungin, Burhan. 2011. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmastuti, Dewi dan Setyaningrum, Dyah. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2009*. Jakarta: Penelitian Universitas Indonesia
- Denzin and Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitati*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Islamy, Irfan M. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasapoetra, A.G. 1994. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kuhn, Thomas. 2000. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*. Jakarta: Penerbit Rosda
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moeleong dan Lexy, L. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Rusidi. 1978. *Dinamika Kelompok Tani dalam Mencapai Tujuannya (Studi Kasus di Desa Amansari, Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang)*. Bogor: Tesis IPB
- Singarimbun, M. dan Effendi, S., ed (1989) *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.

Usman, Hundaeni dan P.S Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

### **Laporan dan Dokumentasi**

<http://disnak.jatimprov.go.id/web/layananpublik/datastatistik>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIP) Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Kab. Jember Tahun 2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jember pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2015

Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember dengan Kelompok Ternak Annur Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Nomor: 524/395.1/419/2015

Profil Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember Tahun 2015

### **Peraturan Perundangan**

Salinan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/221/012/2015 Tentang Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember Tahun 2015

Peraturan Bupati Jember Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jember

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah